

***ANALYSIS CONTRIBUTION OF RESTAURANT TAX AND ENTERTAINMENT TAX
PARTIALLY TO REGIONAL ORIGINAL REVENUE IN TAKALAR REGENCY***

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN DAN
PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
TAKALAR**

MUSDALIFAH

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Makassar
Jl. A. P. Pettarani Kampus Gunung Sari Baru, Makassar
Email : musdalivaa@gmail.com

ABSTRACT

This research aimed (1) to determine the size of contribution of Restaurant Tax and Entertainment Tax partially to Regional Original Revenue in Takalar Regency, (2) to find out the level of effectiveness of Restaurant Tax and Entertainment Tax of Takalar Regency, (3) to find out the level of efficiency of Restaurant Tax and Entertainment Tax in Takalar Regency, and (4) to find out the potential of Restaurant Tax and Entertainment Tax in Takalar Regency. The variables of this research are (1) Restaurant tax (X_1), Entertainment Tax (X_2) as independent variables, and (2) Regional Original Revenue as dependent variable (Y). The population of this research are reports on the realization of Regional Original Revenue, Restaurant Tax, and Entertainment Tax in Takalar Regency and the sample are three years starting from 2015 to 2017. The data were collected by documentation. The data obtained were analysis technique is done by contribution analysis, effectiveness analysis, efficiency analysis, and potential analysis.

The results of this research shows that the contribution of Restaurant Tax to Regional Original Revenues in 2015 to 2017 was 0,08 percent, 0,11 percent, and 0,08 percent with very low criteria, while the contribution of Entertainment Tax to Regional Original Revenues in 2015 to 2017 was 0,19 percent, 0,13 percent, and 0,15 percent with very low criteria. The level effectiveness of Restaurant Tax in 2015 to 2017 was 38,39 percent, 65,23 percent, and 58,63 percent with ineffective criteria, while the effectiveness of Entertainment Tax in 2015 to 2017 was 106,37 percent, 96,55 percent, and 123,76 percent with very effective criteria. The level efficiency of Restaurant Tax in 2015 to 2017 was 30,54 percent, 19,51 percent, and 19,84 percent with quite efficient criteria, while the efficiency of Entertainment Tax in 2015 to 2017 was 11,53 percent, 11,43 percent, and 9,44 percent with efficient criteria. Potential of Restaurant Tax and Entertainment Tax in 2015 to 2017 with prime criteria.

Keyword: Restaurant Taxes, Entertainment Taxes, and Regional Revenue.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar, (2) untuk mengetahui tingkat efektivitas Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kabupaten Takalar, (3) untuk mengetahui tingkat efisiensi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kabupaten Takalar, dan (4) untuk mengetahui potensi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kabupaten Takalar. Variabel penelitian ini adalah (1) Pajak Restoran (X_1), Pajak Hiburan (X_2) sebagai variabel bebas, dan (2) Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel terikat (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Kabupaten Takalar dengan sampel tiga tahun mulai tahun 2015 sampai 2017. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis kontribusi, analisis efektivitas, analisis efisiensi, dan analisis potensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015 sampai 2017 sebesar 0,08 persen, 0,11 persen, dan 0,08 persen dengan kriteria sangat kurang, sedangkan kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015 sampai 2017 sebesar 0,19 persen, 0,13 persen, dan 0,15 persen dengan kriteria sangat kurang. Tingkat efektifitas Pajak Restoran pada tahun 2015 sampai 2017 sebesar 38,39 persen, 65,23 persen, dan 58,63 persen dengan kriteria tidak efektif, sedangkan tingkat efektivitas Pajak Hiburan pada tahun 2015 sampai 2017 sebesar 106,37 persen, 96,55 persen, dan 123,76 persen dengan kriteria sangat efektif. Tingkat efisiensi Pajak Restoran pada tahun 2015 sampai 2017 sebesar 30,54 persen, 19,51 persen, dan 19,84 persen dengan kriteria cukup efisien, sedangkan tingkat efisiensi Pajak Hiburan pada tahun 2015 sampai 2017 sebesar 11,53 persen, 11,43 persen, dan 9,44 persen dengan kriteria efisien. Potensi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan pada tahun 2015 sampai 2017 dengan kriteria prima.

Kata kunci: Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia terus meningkatkan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Pembangunan daerah perlu dijalankan atau dikembangkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional. Agar daerah memiliki wewenang penuh dan luas dalam melaksanakan pembangunannya, maka diberlakukanlah Otonomi Daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sejak saat itu sampai sekarang telah diterapkan Sistem Otonomi Daerah yang memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan menganut sistem pemerintahan desentralisasi (dimana pemerintah daerah mengatur sendiri administrasi kesuannya).

Salam (2015:26), menyatakan bahwa: “Otonomi Daerah adalah pemberian hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.”

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan agar daerah otonom tidak hanya menerima bantuan subsidi dari pusat, tapi dituntut juga untuk menggali potensi dan sumber keuangan baru serta sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Pasal 1 ayat 18 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa “Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Takalar meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Landiyanto (2005:19), menyatakan bahwa: “Semakin tinggi kontribusi yang diberikan PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya, sehingga akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif.”

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar di Kabupaten Takalar adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah).

Pajak Restoran, sebagai salah satu jenis Pajak Daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Pajak Restoran adalah Pajak yang dipungut atas setiap pelayanan di

restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, cafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Selain Pajak Restoran, Pajak Hiburan juga menjadi salah satu jenis Pajak Daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan juga menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Kabupaten Takalar adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang luasnya $\pm 566,51$ km² dengan jumlah penduduk ± 250.000 jiwa. Sebagian besar wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari pantai, daratan, dan perbukitan. Hal ini dapat berpotensi menghasilkan Pajak Daerah yang cukup besar yang bersumber dari sektor restoran, pariwisata dan penerimaan lainnya. Dengan banyaknya potensi yang ada diharapkan pemerintah mampu mengembangkannya, sehingga mampu meningkatkan penerimaan Pajak Daerah khususnya Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kabupaten Takalar. Mengingat besarnya peran Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian: ***“Analisis Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar”***.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Nurcholis (2007:182), menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah. Kewenangan untuk memberdayakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah realisasi pendapatan daerah yang didapatkan oleh daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Pajak Daerah

Menurut Suandy (2005:236): “Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. bahwa Subjek Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. Sedangkan, Wajib Pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab sebagai pembayar pajak, pemotong pajak, dan

pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai perundang-undangan perpajakan daerah.

Objek Pajak Daerah ada dua macam yaitu objek pajak daerah provinsi dan objek pajak daerah kabupaten/kota. Takalar merupakan kabupaten/kota, maka Objek Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, disebutkan bahwa: “Pajak Restoran adalah pajak yang atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.”

Pengusaha restoran menjadi wajib pajak aktif yang bertanggung jawab mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang yang telah dipungut dari yang menerima pelayanan atas penjualan makanan dan/atau minuman dari restoran. Ini berarti bahwa pajak restoran menggunakan *Self Assessment system* yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, disebutkan

bahwa “Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.”

Apabila hiburan diselenggarakan atas nama sendiri atau tanggungan beberapa penyelenggara atau oleh satu atau beberapa badan maka masing-masing anggota penyelenggara atau pengurus badan dianggap sebagai wajib pajak dan bertanggung jawab atas pembayaran pajaknya. Dengan demikian, penyelenggara hiburanlah yang bertanggung jawab membayar pajak, tapi pada dasarnya pajak dibayar oleh penonton atau pengunjung yang menonton, menikmati, menggunakan alat hiburan atau mengunjungi hiburan. Jadi penyelenggara hiburan adalah wajib pajak, apabila penonton tidak melunasi pajak yang terutang maka penyelenggara hiburan ini yang bertanggung jawab atas pajak tersebut. Ini berarti Pajak Hiburan merupakan pajak tidak langsung karena beban pajaknya dapat dilimpahkan sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain (pengunjung/penonton).

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

1. Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten Takalar atas setiap pelayanan di restoran. Pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Yang dimaksud objek restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Yang tidak termasuk objek restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.

300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Pajak Restoran ini diukur berdasarkan besarnya kontribusi yang dapat direalisasikan dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Takalar.

2. Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten Takalar atas setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Yang menjadi objek pajak hiburan adalah, seperti tontonan film, tempat wisata, pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, pameran, diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya, sirkus, akrobat, dan sulap, permainan bilyard, golf, dan boling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan fitness centre, serta pertandingan olahraga. Yang tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan sejenisnya. Pajak Hiburan ini diukur berdasarkan besarnya kontribusi yang dapat direalisasikan dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Takalar.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah realisasi pendapatan daerah yang didapatkan oleh daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini diukur berdasarkan besarnya kontribusi yang dapat direalisasikan dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Takalar.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data laporan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kabupaten Takalar. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kabupaten Takalar tahun 2015 sampai 2017.

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi atau mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar. Teknik analisis data yang digunakan yaitu perhitungan kontribusi, efektivitas, efisiensi, dan potensi untuk mengetahui masing-masing pajak restoran dan pajak hiburan pada tahun 2015 sampai 2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

1. Analisis Kontribusi

Dari hasil analisis kontribusi diperoleh target kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2015 yaitu 0,15 persen sedangkan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercapai hanya 0,08 persen. Pada tahun 2016 target kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu 0,14 persen sedangkan kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercapai hanya 0,11 persen. Pada tahun 2017 target kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu 0,13 persen sedangkan kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

tercapai hanya 0,08 persen. Pada tahun 2015 sampai 2017 kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mencapai target kontribusi yang ditentukan oleh pemerintah.

Dan dari hasil analisis kontribusi diperoleh target kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2015 yaitu 0,13 persen sedangkan kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 0,19 persen. Pada tahun 2016 target kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu 0,12 persen sedangkan kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 0,13 persen. Pada tahun 2017 target kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu 0,11 persen sedangkan kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 0,15 persen. Pada tahun 2015 sampai 2017 kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah mencapai target kontribusi yang ditentukan oleh pemerintah.

2. Analisis Efektivitas

Dari hasil analisis efektivitas diperoleh efektivitas penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2015 sebesar 38,39 persen, sedangkan pada tahun 2016 sebesar 65,23 persen yang mengalami peningkatan sebesar 26,84 persen dari tahun 2015, kemudian pada tahun 2017 sebesar 58,63 persen yang mengalami penurunan sebesar 6,6 persen. Pada tahun 2015 dan 2017 pencapaian realisasinya belum bisa melampaui targetnya dan tingkat efektivitasnya masih dalam kriteria tidak efektif karena persentase efektivitasnya masih dibawah 75 persen. Pada tahun 2016 pencapaian realisasinya meningkat dari tahun sebelumnya meskipun belum juga bisa melampaui targetnya dan tingkat efektivitasnya juga masih dalam kriteria tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh

tingginya target yang ditentukan oleh pemerintah namun tidak ada upaya lebih untuk meningkatkan penerimaan Pajak Restoran.

Dan dari hasil analisis efektivitas diperoleh efektivitas penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2015 sebesar 106,37 persen, sedangkan pada tahun 2016 sebesar 96,55 persen yang mengalami penurunan sebesar 9,82 persen dari tahun 2015, kemudian pada tahun 2017 sebesar 123,76 persen yang kembali mengalami kenaikan sebesar 27,21 persen dari tahun 2016. Pada tahun 2015 dan 2017 pencapaian realisasinya sudah melampaui targetnya dan tingkat efektivitasnya sudah dalam kriteria sangat efektif karena persentase efektivitasnya sudah diatas 100 persen. Namun pada tahun 2016 pencapaian realisasinya menurun dan belum bisa melampaui targetnya meskipun tingkat efektivitasnya sudah dalam kriteria cukup efektif. Hal ini disebabkan oleh tingginya target yang ditentukan oleh pemerintah namun tidak ada upaya lebih untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan.

3. Analisis Efisiensi

Dari hasil analisis efisiensi diperoleh bahwa persentase efisiensi penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2015 sebesar 30,54 persen, pada tahun 2016 sebesar 19,51 persen yang mengalami penurunan sebesar 11,03 persen dari tahun 2015, kemudian pada tahun 2017 sebesar 19,84 persen yang mengalami peningkatan sebesar 0,33 persen. Pada tahun 2015 tingkat efisiensinya sudah dalam kriteria cukup efisien karena persentase efisiennya sudah mencapai 30 persen. Sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 tingkat efisiensinya dalam kriteria efisien karena persentase efisiennya dibawah 20 persen. Hal ini disebabkan oleh berhasilnya pemerintah dalam meminimalisir dan menghemat biaya yang dikeluarkan saat pemungutan Pajak Restoran.

Dan dari hasil analisis efisiensi diperoleh efisiensi penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2015 sebesar 11,53 persen, pada tahun 2016 sebesar 11,43 persen yang mengalami penurunan sebesar 0,10 persen dari tahun 2015, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 9,44 persen yang mengalami penurunan juga sebesar 1,99 persen. Tingkat efisiensi penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2015 dan 2016 sudah dalam kategori efisien karena persentasenya dibawah 20 persen. Sedangkan pada tahun 2017 juga sudah dalam kriteria sangat efisien karena persentasenya kurang dari 10 persen. Hal ini disebabkan oleh berhasilnya pemerintah dalam meminimalisir dan menghemat biaya yang dikeluarkan saat pemungutan Pajak Hiburan.

4. Analisis Potensi

Dari hasil analisis potensi diperoleh pada tahun 2015 sampai 2017 potensi penerimaan Pajak Restoran masuk dalam kriteria prima (diatas potensial) karena $\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y}$ (proporsi tambahan suatu jenis Pajak Restoran dari total tambahan penerimaan Pajak Restoran) yaitu 1 dan $\frac{Y_i}{\bar{Y}}$ (proporsi suatu jenis Pajak Restoran dari rerata Pajak Restoran) yaitu 47 dimana baik $\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y}$ sama dengan 1 dan $\frac{Y_i}{\bar{Y}}$ lebih dari 1. Hal ini berarti potensi Objek Restoran di Kabupaten Takalar masih bisa digali lebih baik lagi agar dapat meningkatkan penerimaan Pajak Restoran sehingga dapat berkontribusi lebih banyak lagi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dan dari hasil analisis potensi diperoleh pada tahun 2015 sampai 2017 potensi penerimaan Pajak Hiburan masuk dalam kriteria prima (diatas potensial) karena $\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y}$ (proporsi tambahan suatu jenis Pajak Hiburan dari total tambahan penerimaan Pajak Hiburan) yaitu 1 dan $\frac{Y_i}{\bar{Y}}$ (proporsi suatu jenis Pajak Hiburan dari

rerata Pajak Hiburan) yaitu 10 dimana $\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y}$ sama dengan 1 dan $\frac{Y_i}{\bar{Y}}$ lebih dari 1. Hal ini berarti potensi Objek Hiburan di Kabupaten Takalar masih bisa digali lebih baik lagi agar dapat meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan sehingga dapat berkontribusi lebih banyak lagi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian pada kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyatakan bahwa kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kurang. Jika dilihat dari tingkat efektivitas Pajak Restoran masihtidak efektif. Namun diilihat dari tingkat efisiensi Pajak Restoran sudah efisien. Dan dilihat juga potensi Pajak Restoran termasuk dalam kriteria prima (diatas potensial). Artinya Pajak Restoran mempunyai potensi untuk dikembangkan agar target penerimaan Pajak Restoran yang telah ditentukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dapat tercapai dan perlu pengawasan lebih lagi dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar pada proses pemungutannya agar dapat meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Restoran dari tahun ke tahun sehingga Pajak Restoran dapat berkontribusi sangat baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sedangkan, kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga masih sangat kurang, meskipun kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dari kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika dilihat dari tingkat efektivitas Pajak Hiburan sudah sangat efektif. Dilihat juga dari tingkat efisiensi Pajak Hiburan juga sudah efisien. Dan dilihat juga potensi Pajak Hiburan termasuk dalam kriteria prima. Artinya Pajak Hiburan juga mempunyai potensi untuk

dikembangkan agar target dapat ditingkatkan lagi dengan melihat realisasi penerimaan dari tahun ketahun dan juga perlu pengawasan lebih lagi dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar pada proses pemungutannya agar dapat meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Hiburan dari tahun ke tahun sehingga Pajak Hiburan dapat berkontribusi sangat baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kabupaten Takalar:

1. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Takalar pada tahun 2015 sampai 2017 termasuk dalam kriteria sangat kurang. Berdasarkan tingkat efektivitas Pajak Restoran pada tahun 2015 sampai 2017 termasuk dalam kriteria tidak efektif. Tingkat efisiensi Pajak Restoran pada tahun 2015 termasuk dalam kriteria cukup efisien sedangkan tingkat efektivitas pada tahun 2016 dan 2017 termasuk dalam kriteria efisiensi. Dan Potensi Pajak Restoran pada tahun 2015 sampai 2017 termasuk dalam kriteria prima (diatas potensial).
2. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Takalar pada tahun 2015 sampai 2017 termasuk dalam kriteria sangat kurang. Berdasarkan tingkat efektivitas Pajak Hiburan pada tahun 2015 sampai 2017 secara berturut-turut sebesar 106,37 persen, 96,55 persen, 123,76 persen. Tingkat efektivitas Pajak Hiburan pada tahun 2015 dan 2017 termasuk dalam kriteria sangat efektif sedangkan tingkat efektivitas pada tahun 2016 termasuk dalam kriteria cukup efektif. Efisiensi Pajak Hiburan

pada tahun 2015 sampai 2017 secara berturut-turut sebesar 11,53 persen, 11,43 persen, 9,44 persen. Tingkat efisien Pajak Hiburan pada tahun 2015 dan 2016 termasuk dalam kriteria efisien, sedangkan tingkat efisiensi Pajak Hiburan pada tahun 2017 termasuk dalam kriteria sangat efisien. Potensi Pajak Hiburan pada tahun 2015 sampai 2017 termasuk dalam kriteria prima (diatas potensial).

3. Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyatakan bahwa kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2015 sampai 2017 masih sangat kurang sedangkan kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2015 sampai 2017 juga masih sangat kurang. Meskipun jika dibandingkan kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih rendah dari kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Takalar dalam meningkatkan penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dalam menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Takalar agar lebih realistis dalam menentukan dan/atau menetapkan target pemungutan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, tidak hanya berpatokan pada target tahun-tahun sebelumnya tetapi memperhatikan potensi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan yang ada di Kabupaten Takalar.
2. Diharapkan pula pemerintah agar dapat lebih berupaya lagi dalam menggali

- potensi-potensi yang ada pada objek pajak restoran dan objek pajak hiburan sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.
3. Memberikan penyuluhan pajak kepada Wajib Pajak Restoran dan Wajib pajak Hiburan tentang hak dan kewajiban serta manfaat dari pajak yang dibayarkan baik bagi Wajib Pajak Restoran dan Wajib Pajak Hiburan maupun bagi Pemerintah Kabupaten Takalar.
 4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan tidak hanya berfokus pada Pajak Restoran dan Pajak Hiburan namun untuk semua jenis Pajak Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwin.(2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*.Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Guritno, T. (1997). *Kamus Ekonomi-bisnis-perbankan: Inggris-Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Halim, A.(2012). *Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4*.Jakarta: Salemba Empat.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2016. Edisi ke-Lima. Jakarta:Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Landiyanto, E. A.(2005). *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya*. Cures Working Paper.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: ANDI.
- Melinda, C.(2017). *Analisis kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, 55.
- Nurcholis, H.(2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Yani, A.(2013). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*.Jakarta: Rajawali Pers.
- Pekei, B.(2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonom*. Jakarta: Taushia.
- Priantara, D. (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi Kedua Revisi*.Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Salam, D. S.(2015). *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*. Jakarta: Djembatan.
- Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan di Indonesia : Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suandy.(2005). *Hukum Pajak Edisi Ketiga*.Jakarta : Salemba Empat.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 2006 tentang Pedoman Penelitian dan Kinerja Keuangan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.
- Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.